



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 13a /O/1998

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997**

III. PROPINSI JAWA TENGAH

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998**



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 13a /O/1998

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997**

III. PROPINSI JAWA TENGAH

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998**

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERANGAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penerangan sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

2.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1977;
- b. Nomor 0296/O/1977;
- c. Nomor 0222b/O/1977;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1987;
- f. Nomor 0173/O/1987;
- g. Nomor 0262/O/1987;
- h. Nomor 0248/U/1987;
- i. Nomor 0486/U/1991;
- j. Nomor 0487/U/1991;
- k. Nomor 0489/U/1991;
- l. Nomor 0490/U/1991;
- m. Nomor 0491/U/1991;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/1/1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGELOMPOKAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, wewenang, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

(2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembinaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan yang sesuai sebagai Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 8 buah;
 2. SLB Negeri 5 buah;
 3. SLTP Negeri 42 buah;
 4. SMU Negeri 23 buah;
 5. SMK Negeri 19 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttt.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

22

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedyayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktorat Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setingkat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENERGERIAN				JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	
1.	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	2
2.	JAWA BARAT	3	-	56	19	-	78	-	-	-	-	-	78
3.	JAWA TENGAH	3	-	57	18	-	78	-	-	-	-	-	78
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	6	-	-	-	-	-	6
5.	JAWA TIMUR	3	-	50	20	2	75	-	-	-	-	-	75
6.	D.I. ACEH	1	-	10	5	1	17	-	-	-	-	-	19
7.	SUMATERA UTARA	2	-	16	5	2	29	-	-	1	1	-	30
8.	SUMATERA BARAT	1	1	7	1	1	16	-	-	-	-	-	16
9.	RIAU	1	1	13	1	1	21	-	-	-	1	-	22
10.	JAMBI	1	-	8	-	-	14	-	-	-	-	-	14
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	17	-	-	26	-	-	-	-	-	26
12.	LAMPUNG	1	-	15	-	1	23	-	-	-	-	-	23
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	-	1	17	-	-	-	-	-	17
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	-	-	11	-	-	-	-	-	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	-	1	15	-	-	-	-	-	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	-	-	14	-	-	-	-	-	14
17.	SULAWESI UTARA	1	-	10	-	-	15	-	-	-	-	-	15
18.	SULAWESI TENGAH	1	1	8	-	-	14	-	-	-	-	-	14
19.	SULAWESI SELATAN	2	-	30	-	2	43	-	-	-	-	-	43
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	-	-	11	-	-	1	-	-	12
21.	MALUKU	1	-	12	-	-	17	-	-	1	-	-	18
22.	BALI	1	-	3	-	-	8	-	-	1	-	-	9
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	-	1	18	-	-	-	-	-	18
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	-	1	16	-	-	-	-	-	16
25.	IRIAN JAYA	1	-	9	-	2	15	-	-	-	-	-	15
26.	BENGKULU	1	-	5	-	-	9	-	-	-	-	-	9
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	-	1	6	-	-	-	-	-	6
JUMLAH		37	6	386	8	17	614	0	0	5	2	0	621

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO 1	PROPINSI 2	NAMA SEKOLAH 3	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK 4	LOKASI SEKOLAH		MATA ANGGRAN 7
				KECAMATAN 5	KAB/KODIA/KOTIP 6	
1. A.	DKI JAKARTA Pembukaan	1. SLTP Negeri 282 Jakarta		Tanjung Priuk	Kotamadia Jakarta Utara	11.1.1.4242.23.01.01.5110
						11.1.1.4242.23.01.01.5120
						11.1.1.4242.23.01.01.5150
						11.1.1.4242.23.01.01.5210
						11.1.1.4242.23.01.01.5220
						11.1.1.4242.23.01.01.5230
						11.1.1.4242.23.01.01.5250
						11.1.1.4242.23.01.01.5350
		2. SMU Negeri 11 Jakarta		Cakung	Kotamadia Jakarta Timur	11.1.2.4251.23.01.01.5110
						11.1.2.4251.23.01.01.5120
						11.1.2.4251.23.01.01.5150
						11.1.2.4251.23.01.01.5210
						11.1.2.4251.23.01.01.5220
						11.1.2.4251.23.01.01.5230
						11.1.2.4251.23.01.01.5250
						11.1.2.4251.23.01.01.5350

1	2	3	4	5	6	7
3	JAWA TENGAH					
A	Pembukaan	1. TK Negeri Klaten	-	Klaten Utara	Kabupaten Klaten	11.1.1.4236.23.01.03.5110
		2. TK Negeri Pemalang	-	Pemalang	Kabupaten Pemalang	11.1.1.4236.23.01.03.5120
		3. TK Negeri Temanggung	-	Ngadirejo	Kabupaten Temanggung	11.1.1.4236.23.01.03.5150
		4. SLTP Negeri 3 Ngawen	-	Ngawen	Kabupaten Bora ✓	11.1.1.4236.23.01.03.5220
		5. SLTP Negeri 2 Doplang	-	Doplang ✓	Kabupaten Bora ✓	11.1.1.4236.23.01.03.5230
		6. SLTP Negeri 2 Bantarkawung	-	Bantarkawung	Kabupaten Brebes	11.1.1.4236.23.01.03.5250
		7. SLTP Negeri 1 Songgom	-	Songgom	Kabupaten Brebes	11.1.1.4242.23.01.03.5110
		8. SLTP Negeri 3 Ampel	-	Ampel	Kabupaten Boyolali	11.1.1.4242.23.01.03.5120
		9. SLTP Negeri 2 Cepogo	-	Cepogo	Kabupaten Boyolali	11.1.1.4242.23.01.03.5150
		10. SLTP Negeri 2 Kiejo	-	Kiejo	Kabupaten Boyolali	11.1.1.4242.23.01.03.5210
		11. SLTP Negeri 2 Banjarmangu	-	Banjarmangu	Kabupaten Banjarnegara	11.1.1.4242.23.01.03.5220
						11.1.1.4242.23.01.03.5230
						11.1.1.4242.23.01.03.5250
						11.1.1.4242.23.01.03.5350

1	2	3	4	5	6	7
		12. SLTP Negeri 3 Kalibening	-	Kalibening	Kabupaten Banjarnegara	
		13. SLTP Negeri 2 Gumelar	-	Gumelar	Kabupaten Banyumas	
		14. SLTP Negeri 2 Purwojati	-	Purwojati	Kabupaten Banyumas	
		15. SLTP Negeri 3 Blado	-	Blado	Kabupaten Batang	
		16. SLTP Negeri 3 Bandar	-	Bandar	Kabupaten Batang	
		17. SLTP Negeri 2 Wanatunggal	-	Wanatunggal	Kabupaten Batang	
		18. SLTP Negeri 3 Kesugihan	-	Kesugihan	Kabupaten Cilacap	
		19. SLTP Negeri 1 Bantarsari	-	Bantarsari	Kabupaten Cilacap	
		20. SLTP Negeri 3 Mranggen	-	Mranggen	Kabupaten Demak	
		21. SLTP Negeri 2 Guntur	-	Guntur	Kabupaten Demak	
		22. SLTP Negeri 4 Geyer	-	Geyer	Kabupaten Grobogan	
		23. SLTP Negeri 1 Nalumsari	-	Nalumsari	Kabupaten Jepara	

1	2	3	4	5	6	7
		24. SLTP Negeri 2 Kedung	-	Kedung	Kabupaten Jepara	
		25. SLTP Negeri 2 Puring	-	Puring	Kabupaten Kebumen	
		26. SLTP Negeri 3 Trucuk	-	Trucuk	Kabupaten Klaten	
		27. SLTP Negeri 2 Karangnongko	-	Karangnongko	Kabupaten Klaten	
		28. SLTP Negeri 3 Dawe	-	Dawe	Kabupaten Kudus	
		29. SLTP Negeri 4 Cepiring	-	Cepiring	Kabupaten Kendal	
		30. SLTP Negeri 3 Jumantono	-	Jumantono	Kabupaten Karanganyar	
		31. SLTP Negeri 3 Mojogedang	-	Mojogedang	Kabupaten Karanganyar	
		32. SLTP Negeri 2 Bandongan	-	Bandongan	Kabupaten Magelang	
		33. SLTP Negeri 2 Kaliangkrik	-	Kaliangkrik	Kabupaten Magelang	
		34. SLTP Negeri 3 Bodeh	-	Bodeh	Kabupaten Pemalang	
		35. SLTP Negeri 3 Moga	-	Moga	Kabupaten Pemalang	

1	2	3	4	5	6	7
		36. SLTP Negeri 4 Ulujami	-	Ulujami	Kabupaten Pemalang	
		37. SLTP Negeri 3 Pamotan	-	Pamotan	Kabupaten Rembang	
		38. SLTP Negeri 4 Nguter	-	Nguter	Kabupaten Sukoharjo	
		39. SLTP Negeri 4 Tawang Sari	-	Tawang Sari	Kabupaten Sukoharjo	
		40. SLTP Negeri 3 Bendosari	-	Bendosari	Kabupaten Sukoharjo	
		41. SLTP Negeri 3 Polokarto	-	Polokarto	Kabupaten Sukoharjo	
		42. SLTP Negeri 3 Getasan	-	Getasan	Kabupaten Semarang	
		43. SLTP Negeri 3 Bringin	-	Bringin	Kabupaten Semarang	
		44. SLTP Negeri 3 Kelepu	-	Kelepu	Kabupaten Semarang	
		45. SLTP Negeri 3 Suruh	-	Suruh	Kabupaten Semarang	
		46. SLTP Negeri 2 Sambirejo	-	Sambirejo	Kabupaten Sragen	

1	2	3	4	5	6	7
	47. SLTP Negeri 2 Dukuhwaru		-	Dukuhwaru	Kabupaten Tegal	
	48. SLTP Negeri 3 Bumijawa		-	Bumijawa	Kabupaten Tegal	
	49. SLTP Negeri 2 Bulu		-	Bulu	Kabupaten Temanggung	
	50. SLTP Negeri 4 Bulukerto		-	Bulukerto	Kabupaten Wonogiri	
	51. SLTP Negeri 2 Tirtomoyo		-	Tirtomoyo	Kabupaten Wonogiri	
	52. SLTP Negeri 4 Purwanto		-	Purwanto	Kabupaten Wonogiri	
	53. SLTP Negeri 2 Slogohimo		-	Slogohimo	Kabupaten Wonogiri	
	54. SLTP Negeri 2 Paranggupito		-	Paranggupito	Kabupaten Wonogiri	
	55. SLTP Negeri 3 Sidoharjo		-	Sidoharjo	Kabupaten Wonogiri	
	56. SLTP Negeri 5 Kepil		-	Kepil	Kabupaten Wonosobo	
	57. SLTP Negeri 2 Garung		-	Garung	Kabupaten Wonosobo	
	58. SLTP Negeri 2 Kejajar		-	Kejajar	Kabupaten Wonosobo	

1	2	3	4	5	6	7
	59. SLTP Negeri 3 Mojotengah		-	Mojotengah	Kabupaten Wonosobo	11.1.2.4251.23.01.03.5110
	60. SLTP Negeri 4 Leksono		-	Leksono	Kabupaten Wonosobo	11.1.2.4251.23.01.03.5120
	61. SMU Negeri 4 Pekalongan		-	Pekalongan	Kotamadia Pekalongan	11.1.2.4251.23.01.03.5150
	62. SMU Negeri 1 Jepón		-	Jepón	Kabupaten Blora	11.1.2.4251.23.01.03.5210
	63. SMU Negeri 1 Klego		-	Klego	Kabupaten Boyolali	11.1.2.4251.23.01.03.5220
	64. SMU Negeri 1 Salem		-	Salem	Kabupaten Brebes	11.1.2.4251.23.01.03.5230
	65. SMU Negeri 1 Sampang		-	Sampang	Kabupaten Cilacap	11.1.2.4251.23.01.03.5250
	66. SMU Negeri 1 Dempet		-	Dempet	Kabupaten Demak	11.1.2.4251.23.01.03.5350
	67. SMU Negeri 2 Mranggen		-	Mranggen	Kabupaten Demak	
	68. SMU Negeri 1 Gantiwarno		-	Gantiwarno	Kabupaten Klaten	
	69. SMU Negeri 1 Klirong		-	Klirong	Kabupaten Kebumen	
	70. SMU Negeri 1 Kedungreja		-	Kedungreja	Kabupaten Kebumen	

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	Pembukaan	1. TK Negeri Aileu	-	Aileu	Kabupaten Aileu	11.1.1.4236.23.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350
		2. SLTP Negeri 2 Bobonaro	-	Bobonaro	Kabupaten Bobonaro	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120 11.1.1.4242.23.01.27.5150 11.1.1.4242.23.01.27.5210 11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350
		3. SLTP Negeri 5 Baucau	-	Baucau Kota	Kabupaten Baucau	
		4. SMU Negeri 2 Pante Makassar	-	Pante Makassar	Kabupaten Ambeno	11.1.2.4251.23.01.27.5110 11.1.2.4251.23.01.27.5120 11.1.2.4251.23.01.27.5150 11.1.2.4251.23.01.27.5210 11.1.2.4251.23.01.27.5220 11.1.2.4251.23.01.27.5230 11.1.2.4251.23.01.27.5250 11.1.2.4251.23.01.27.5350
		5. SMU Negeri 1 Lautem	-	Lautem	Kabupaten Lautem	

1	2	3	4	5	6	7
		6. SMK Negeri 1 Maliana	-	Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.2.4267.23.01.27.5110 11.1.2.4267.23.01.27.5120 11.1.2.4267.23.01.27.5150 11.1.2.4267.23.01.27.5210 11.1.2.4267.23.01.27.5220 11.1.2.4267.23.01.27.5230 11.1.2.4267.23.01.27.5250 11.1.2.4267.23.01.27.5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof.Dr. – Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Berundang-undangan,

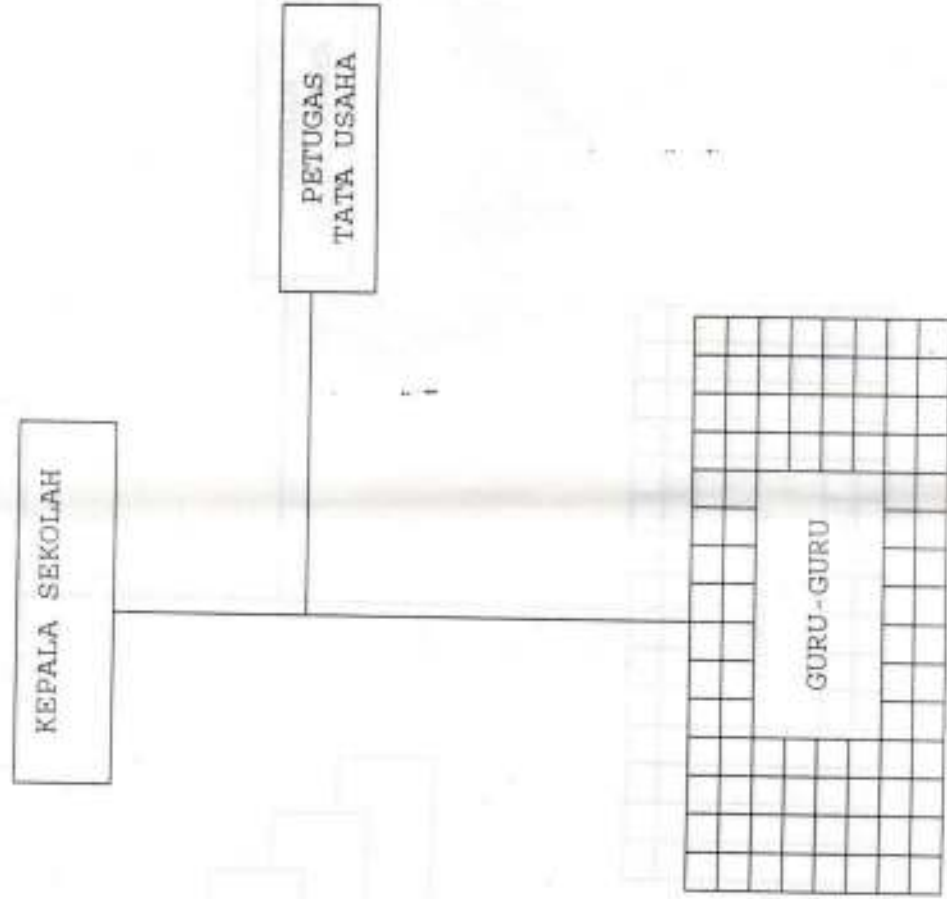


Muslikh, S.H.
NIP 131479478

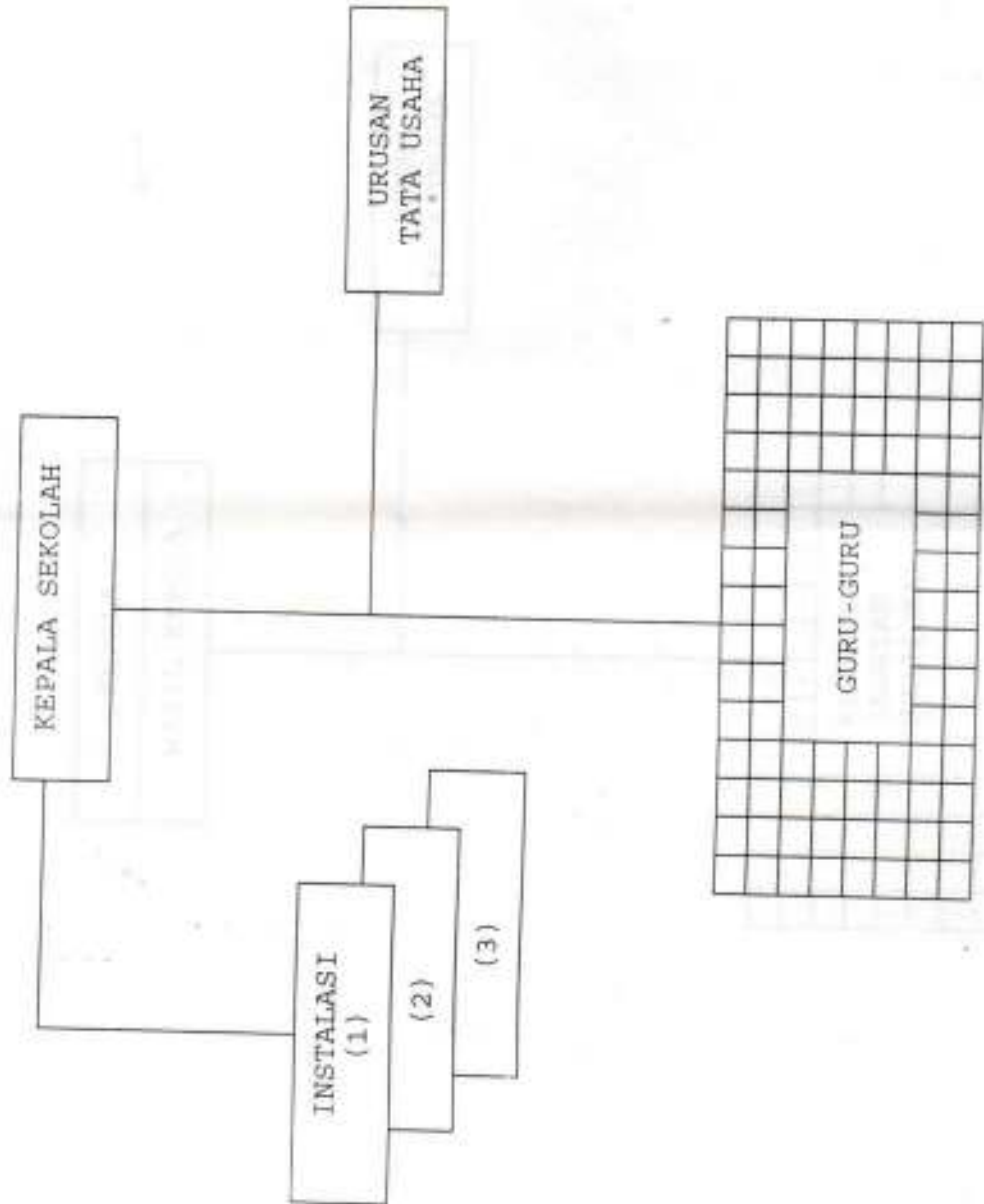
LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a /O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

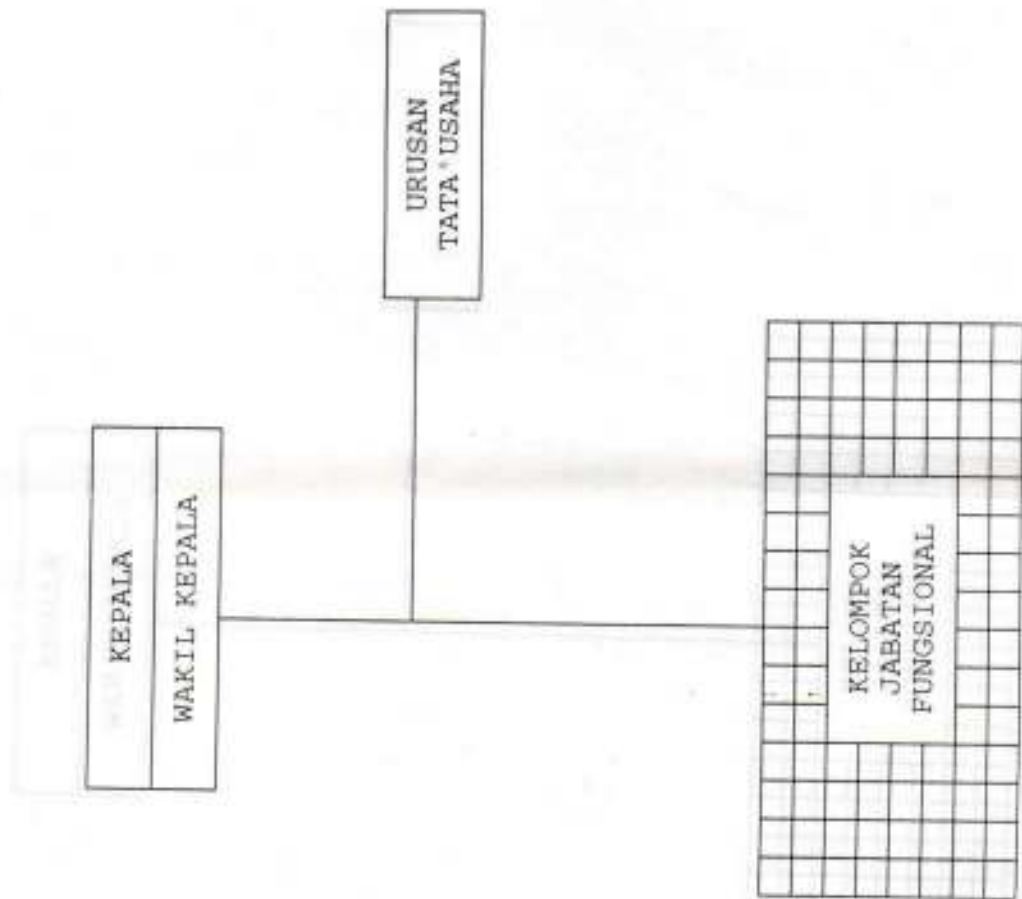
A. BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK



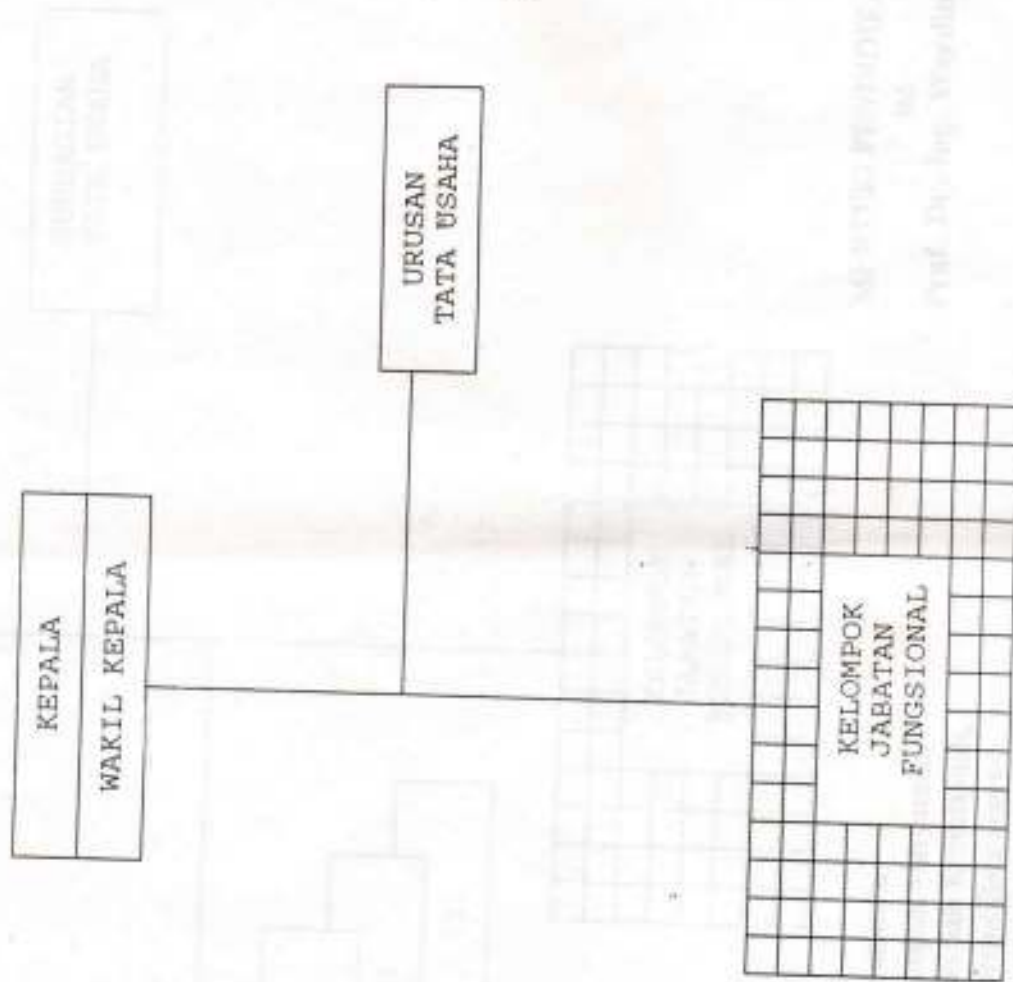
B. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LUAR BIASA



C. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA

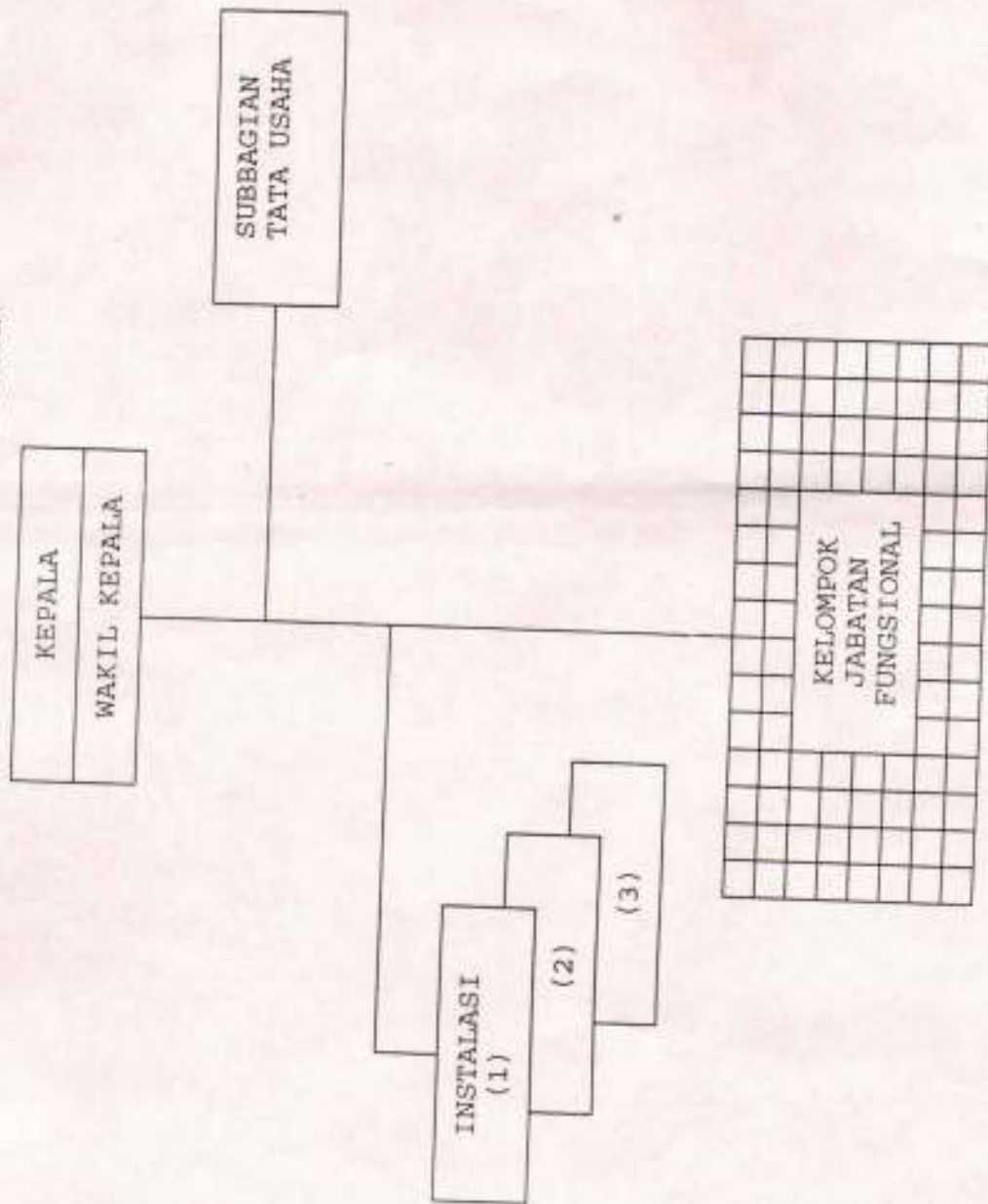


D. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM



2.

E. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro



